

MENGGALI NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN SULTAN HAMID II DI KANCAH LOKAL DAN NASIONAL

Teguh Agustian¹⁾, Rina²
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak
Jl. Ampera No. 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219/6589855
e-mail: teguh26agustian@gmail.com¹⁾, rinac4hy4n1@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali nilai-nilai kepahlawanan Sultan Hamid II di kancah nasional dan lokal yang merupakan putra daerah dari Kalimantan Barat. Dalam catatan sejarahnya Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Alkadrie banyak memberikan sumbangsuhnya pada negara, baik pada saat Indonesia masih berstatus RIS (Republik Indonesia Serikat), NIS (Negara Indonesia Serikat) dan pada saat menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sultan Hamid II juga berkiprah dalam KMB (Konfrensi Meja Bundar) dan pernah menjadi Menteri negara zonder portofolio pada saat itu, sedangkan dalam kancah lokalnya di Kalimantan Barat beliau juga menjadi Sultan ke VIII di keraton Kadariah Pontianak dan pernah menjadi ketua DIKB (Daerah Istimewa Kalimantan Barat). Metodologi dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian historis, yaitu menggunakan *Heuristik*, *Verifikasi (Kritik Sumber)*, *Interpretasi* dan *Penulisan (Historiografi)* sebagai acuan dalam mengolah data dan menelaah sumber-sumber yang didapatkan dalam penelitian, sehingga data dapat diolah dan dijadikan tulisan dalam penelitian.

Katakunci: Sultan Hamid II, Nilai-nilai Kepahlawanan

Abstract

The purpose of this research is to explore the heroic values of Sultan Hamid II at the national and local level who is a native of West Kalimantan. In his historical records, Sultan Hamid II or Syarif Abdul Hamid Alkadrie made many contributions to the state, both when Indonesia was still in the status of RIS (United Republic of Indonesia), NIS (United States of Indonesia) and when it became NKRI (Unitary Republic of Indonesia). Sultan Hamid II also took part in the KMB (Round Table Conference) and was once a portfolio zonder state minister at that time, while in his local arena in West Kalimantan he also became the VIII Sultan at the Kadariah Pontianak palace and was once the chairman of the DIKB (Special Region of West Kalimantan). The methodology in this study is to use historical research, namely using Heuristics, Verification (Source Criticism), Interpretation and Writing (Historiography) as a reference in processing data and examining sources obtained in research, so that data can be processed and made into writing in research.

Keywords: *Sultan Hamid II, Heroic values*

PENDAHULUAN

Sejak meletusnya perjuangan yang terjadi di berbagai daerah, yang ditujukan untuk menghancurkan kolonialisme, menjadi tonggak utama rakyat di setiap daerah untuk bisa mempertahankan daerahnya masing-masing dari para penjajah, seperti halnya yang dilakukan di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak dan daerah sekitarnya. Pada tahun 1943-1945, para pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, yang pada saat itu pada hari Jum'at tepatnya pada tanggal 19 Desember 1941 tentara Jepang mulai menduduki Kalimantan Barat melalui Pontianak dan pada tanggal 2 Februari 1942 kota Pontianak resmi diduduki Angkatan Darat (Rikugun) Jepang. Perjuangan di berbagai daerah ini juga berlanjut sebagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera.

Puncak dari perlawanan ini terjadi pada tanggal 16 Oktober 1943 yang diawali dengan pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat Pontianak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. Mereka sepakat untuk merebut kekuasaan dari pemerintah kolonial Jepang dan mendirikan Negeri Rakyat Kalimantan Barat lengkap dengan 18 menterinya. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1943, para pejuang kembali melakukan serangan terhadap Jepang. Akan tetapi perjuangan itu dapat dipatahkan Jepang, dan pada tanggal 23 Oktober 1943, terjadi penangkapan terhadap sejumlah tokoh di kalangan rakyat Pribumi, Cina, Arab, India dan Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1944 terjadi penangkapan tahap kedua. Beberapa tokoh yang tertangkap di antaranya adalah Dr. Rubini dan istri, Demang Muslim Nataprana, dan semua raja di Kalimantan Barat, seperti Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan Muhammad Yusuf Alkadrie (Sultan Pontianak), Muhammad Ibrahim Tsafiuddin (Sultan

Sambas), Sultan Hamid (Panembahan Ketapang), dan sebagainya (Usman, 2007:1-3)

Kalimantan Barat pada masa kolonial Belanda, setelah diterbitkannya tata aturan sistem pemerintahan tersebut berbentuk keresidenan yang berada dibawah provinsi Kalimantan yang ibukotanya berkedudukan di Banjarmasin. Keresidenan Kalimantan Barat dengan ibukotanya Pontianak, selanjutnya dibagi menjadi empat afdeling, afdeling pertama masuk kedalam Wester Afdeling van Borneo, yaitu afdeling Singkawang yang terdiri dari Sambas, Singkawang, Bengkayang dan Mempawah. Afdeling kedua yaitu Pontianak, yang terdiri dari Pontianak, Landak, Sanggau, dan Sekadau. Afdeling ketiga yaitu Ketapang, yang terdiri dari Sukadana, Banedan Matan, dan Boven Matan. Afdeling keempat yaitu Sintang, yang terdiri dari Melawi, Sintang, Semitau dan Boven Kapuas.

Setelah berlangsungnya perlawanan, yang dipimpin oleh para pemimpin daerah, seperti Sultan Syarif Yusuf Alkadrie (1872-1895), Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (1895-1944), Sultan Syarif Thaha Alkadrie (1944-1945) bisa membendung kolonialisme yang terjadi pada saat itu. Setelah sepeninggalan dari perjuangan itu kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (<http://istanakadariah.blogspot.com/2007/07/sultan-hamid-ii-pencipta-lambang-negara.html>).

Selama memerintah pada tahun (1945-1950), Sultan Hamid II banyak melakukan perubahan-perubahan baik untuk pemerintahannya di Kesultanan Kadariah Pontianak, maupun bagi bangsa Indonesia. Sehingga eksistensinya dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia tidak diragukan lagi. Selain itu Sultan Hamid II sendiri juga

berkecimpung secara langsung dalam tatanan pemerintah Indonesia, Sultan Hamid II juga merilis konsep awal lambang Garuda sebagai lambang Negara dan merilis diadakannya hak otonomi daerah (istanakadariah.blogspot.com/2007/07/sultan-hamid-ii-pencipta-lambang-negara-htm). Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Den Haag, sebagai wakil negara-negara bagian dan daerah federasi, Sultan Hamid II dengan gigihnya memperjuangkan agar negara Indonesia tetap menjadi sebuah negara Federal dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Selaku ketua DIKB, Sultan Hamid II berusaha agar status Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa mendapat pengakuan resmi dalam perundingan dengan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah Belanda.

METODE

Sejarah sebagai ilmu terikat pada prosedur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat dengan penalaran yang bersandar pada fakta. Secara positif sejarah mengkaji tentang waktu, yaitu mengkaji masyarakat dari segi waktu. Sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki metode tersendiri dalam mengungkapkan peristiwa masa lampau agar menghasilkan karya sejarah yang kritis, ilmiah dan objektif. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif serta melakukan penilaian secara kritis dalam bentuk tulisan. Menurut Kuntowijoyo metode sejarah ialah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah. Metode sejarah merupakan suatu proses untuk

menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis data-data yang ada, sehingga menjadi cerita sejarah yang dapat dipercaya (Sjamsuddin dan Ismaun, 1993:61).

Sedangkan Menurut Nugroho Notosusanto (1971:35), tahapan penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan penulisan:

- a) *Heuristik* diartikan sebagai upaya untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam rangka mendukung rekonstruksi masa lampau dari peristiwa yang akan ditulis. Menurut Kuntowijoyo heuristik merupakan kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah, yang di dalam bahasa Inggris disebut *datum* (bentuk tunggal) dan *data* (bentuk jamak). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau
- b) *Verifikasi (Kritik Sumber)* merupakan kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reliabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan intern
- c) *Interpretasi* merupakan kegiatan analisis yang didapatkan dari sumber yang telah dikumpulkan dan diverifikasi. Pada tahap interpretasi, penulis melakukan penafsiran terhadap sumber yang sudah

mengalami kritik ekstern dan intern dari data-data yang diperoleh, berfungsi untuk menyusun kata-kata yang belum tersusun dengan baik

- d) *Penulisan (Historiografi)* merupakan kegiatan penyampaian sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis. Historiografi merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sebuah kisah sejarah setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber dan penafsiran sumber yang kemudian dituangkan menjadi sebuah kisah sejarah dalam bentuk tulisan.

PEMBAHASAN

1. Sultan Hamid II menjadi Sultan di Keraton Kadariah

Pada saat Jepang menyerah kalah kepada sekutu, hal ini sangat mempengaruhi keadaan dunia saat itu, terutama negara-negara yang pada saat itu menjadi jajahan Jepang, tidak terkecuali Indonesia juga merasakan keganasan dari negara matahari tersebut. Keruntuhan pemerintah Jepang ditandai dengan dibom atomnya dua kota penting yang menjadi pusat pemerintah Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini juga menandai revolusi senjata-senjata penghancur untuk berperang. Pemerintah Jepang saat itu diberikan pilihan sulit, bertahan dengan serangan sekutu atau menyerah yang nantinya akan berakibat buruk pada wilayah kekuasaannya diluar. Di Indonesia sendiri berita kekalahan Jepang merupakan suatu kesempatan emas bagi rakyat untuk melepaskan diri dari penjajahannya, tidak terkecuali Kalimantan Barat khususnya Pontianak yang pada saat itu berada dibawah penjajahan Jepang (Usman, 2009:101)

Namun hal ini juga merupakan dilema bagi rakyat, setelah lepas masa penjajahan Jepang yang banyak menimbulkan korban dan kengerian pada saat itu, kini penjajah baru mulai mendekati. Sekutu datang dengan siap menggantikan kekuasaan Jepang di Kalimantan Barat dan siap bertempur melawan sisa-sisa pasukan Jepang di sana. Kali ini sekutu datang dengan persiapan yang matang, dengan dibentengi NICA (*Nederlandsch Indie civil Administratie*) dan pasukan Australia, sekutu siap menghabisi pasukan Jepang dan siap merebut kembali Kalimantan Barat dan wilayah-wilayah sekitarnya. Pada awal bulan September 1945 tentara Australia dan NICA telah berhasil menguasai Kalimantan Barat dan wilayah-wilayah sekitarnya dan pada saat itu pemerintah NICA berada dibawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook.

Sebelumnya pada masa pemerintah Jepang masih menduduki Kalimantan Barat, kesultanan keraton Kadariah Pontianak diperintah oleh Sultan Syarif Muhammad Al-Kadrie yang saat itu juga menjadi korban pembantaian keganasan pasukan Dai Nippon. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di kesultanan, maka pada saat itu yang menjadi raja di kesultanan keraton Kadariah Pontianak adalah Sultan Syarif Thaha Al-Kadrie, yang masa pemerintahannya cukup singkat, dari bulan Agustus-Oktober 1945. Dimasa pemerintahannya saat itu yang hanya berkisar kurang lebih 3 bulan, dimana pada saat itu kondisi Kalimantan Barat pada umumnya dan Pontianak pada khususnya, masih tidak stabil setelah peralihan kekuasaan antara Jepang dan sekutu.

Namun pada saat pasukan NICA dan Australia masuk ke Pontianak, bersamaan dengan itu juga kolonel Syarif Hamid yang saat itu masih menjadi perwira aktif KNIL juga pulang ke Pontianak untuk melihat keadaan pasca Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak dan di sekitar kesultanan dimasa

pendudukan Jepang. Syarif Hamid semakin memantapkan dirinya untuk kembali pulang ke Pontianak saat ia mendengar berita bahwa tidak sedikit para saudara dan kerabatnya yang menjadi korban keganasan pasukan Dai Nippon. Ketika tiba di Pontianak, Syarif Hamid Al-Kadrie langsung menemui Sultan Syarif Thaha Al-Kadrie yang saat itu menjadi raja ke VII di kesultanan keraton Kadariah Pontianak dan mengatakan bahwa Yarif Thaha masih sangat terlalu muda dan belum mampu melaksanakan tugasnya di kesultanan, dengan kondisi yang tidak stabil saat ini, tentu akan sulit bagi Syarif Thaha untuk mengatur pemerintahan di kesultanan

Syarif Hamid dilantik menjadi sultan ke VIII di kesultanan keraton Kadariah Pontianak pada tanggal 29 Oktober 1945, adapun pengangkatannya sebagai sultan diikuti beberapa kontroversi antara kemauan sebagian besar rakyat Kalimantan Barat, termasuk keinginan masyarakat Dayak, agar siapapun tampil sebagai sultan, baik itu dari dinasti Al-Kadrie, antara Syarif Thaha atau Syarif Hamid Al-Kadrie, ditujukan secepatnya agar pemerintahan di kesultanan tidak kosong (<http://Syarif-untan.tripod.com/budaya.htm>/Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqadrie, M.Sc)

Secara pribadi seorang Syarif Hamid kurang begitu dikenali oleh masyarakat Pontianak dan sekitarnya, hal ini dikarenakan pada masa kecilnya Syarif Hamid telah diasuh oleh ibu angkatnya Miss Fox saat berusia 7 tahun dan kemudian Syarif Hamid juga banyak melanjutkan pendidikannya di Jawa dan diluar negeri. Hal ini yang menyebabkan Yarif Hamid kurang begitu dikenal kepiawaiannya, karena semasa mudanya banyak dihabiskan di luar keraton, sehingga kedekatan dengan masyarakat hanya sebatas sesaat Syarif Hamid menjadi orang yang terpandang di Pontianak dan daerah sekitarnya. Namun pada saat dirinya menduduki jabatan sebagai seorang Sultan, Syarif Hamid sangat ditaati dan dicintai oleh

warga suku Dayak Kalimantan Barat, tidak hanya dari suku Dayak, bahkan suku-suku di sekitarnya menghormati dirinya sebagai Sultan dikerajaan keraton Kadariah Pontianak yang pada masa pemerintahan Sultan sebelumnya, yaitu Syarif Abdurrahman, pernah berjaya di Kalimantan Barat (Usman, 2007:29)

Sebagai sultan Syarif Hamid berusaha memajukan wilayahnya, diantaranya ia mendirikan sekolah dan memberikan beasiswa kepada masyarakatnya yang ingin melanjutkan Pendidikan (Affandi, 2010:7) saat menjabat sebagai Sultan dikeraton Kadariah Pontianak dan pada saat itu Indonesia yang saat itu masih berstatus RIS kini telah beralih menjadi NKRI, yang kini telah menjadi Negara yang utuh dan tidak lagi terikat oleh apapun serta tidak ada campur tangan dengan Negara lain.

2. Sultan Hamid II menjadi ketua DIKB (Daerah Istimewa Kalimantan Barat)

Sejak terpilihnya Syarif Hamid menjadi sultan ke VIII di kerajaan keraton Kadariah Pontianak, yang sebelumnya tahta kerajaan diperintah oleh Syarif Thaha pada pada bulan Agustus-Oktober 1945, yang pada saat itu menjadikan perubahan di dalam kerajaan dan di Pontianak sendiri. Bahkan di Kalimantan Barat juga mengalami perubahan, karena peranan keraton Kadariah pada masa pemerintahan Jepang sangatlah penting bagi rakyat dan tokoh-tokoh yang mengadakan pemberontakan terhadap kekuasaan Jepang di Pontianak dan di daerah sekitarnya, selain itu juga keraton juga dijadikan sebagai basis penggerak perlawanan terhadap pemerintahan Jepang, diantaranya yaitu Sultan Syarif Muhammad Al-Kadrie merupakan pelopor gerakan perlawanan daerah tersebut.

Dimasa pemerintahannya, Sultan Syarif Hamid atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hamid II tidak hanya menjadikan dirinya sebagai sultan di

kesultanan Pontianak, kepala *Swaparaja*, tetapi juga menjadi kepala pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Tujuan dibentuknya DIKB ini merupakan keputusan gabungan dari para raja atau sultan di Kalimantan Barat, yang kemudian ingin mewujudkan suatu ikatan federasi di Kalimantan Barat dan wilayah sekitarnya, dengan nama Daerah istimewa Kalimantan Barat atau yang dikenal dengan nama DIKB. dan Keputusan tersebut kemudian secara hukum disahkan oleh Residen Kalimantan Barat dengan surat keputusan tanggal 10 Mei 1948 No 161, pada tahun 1948 keluarlah *Besluit Luitenant Gouverneur Jendral* tanggal 2 Mei 1948 No 8 Stabd Lembaran Negara 1948/58 yang mengakui Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa. Dimasa pemerintahannya, Sultan Syarif Hamid atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hamid II tidak hanya menjadikan dirinya sebagai sultan di kesultanan Pontianak, kepala *Swaparaja*, tetapi juga menjadi kepala pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Tujuan dibentuknya DIKB ini merupakan keputusan gabungan dari para raja atau sultan di Kalimantan Barat, yang kemudian ingin mewujudkan suatu ikatan federasi di Kalimantan Barat dan wilayah sekitarnya, dengan nama Daerah istimewa Kalimantan Barat atau yang dikenal dengan nama DIKB. dan Keputusan tersebut kemudian secara hukum disahkan oleh Residen Kalimantan Barat dengan surat keputusan tanggal 10 Mei 1948 No 161, pada tahun 1948 keluarlah *Besluit Luitenant Gouverneur Jendral* tanggal 2 Mei 1948 No 8 Stabd Lembaran Negara 1948/58 yang mengakui Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa (Faturrahman, 2007)

(Wawancara dengan Pak Simon (Syarif Selamat Joesoef Al-kadrie) di rumah lingkungan keluarga keraton, pukul 08.30, tanggal 25 Juni 2010 (sumber pribadi). Saat itu saya dan Sultan Hamid II, dimana Sultan lebih sering memanggil nama saya dengan

nama Simon (nama Belanda) dari pada Syarif Yusuf. Saat itu Sultan Hamid II sudah tidak aktif lagi menjadi pejabat Negara, kini Sultan Hamid II telah menjadi Sultan di kerajaan keraton kadariah Pontianak. saat itu saya masih ingat kata-kata Sultan mengenai pembangunan di Kalimantan Barat dan untuk Indonesia sendiri. dulu orang-orang tidak terlalu mengerti perihal dibentuknya DIKB yang menjadikan status Kalimantan Barat menjadi daerah istimewa dan diberlakukannya hak otonom, yang dimana setiap daerah dapat bebas mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Sultan berpandangan, bahwa 30 tahun kedepan hak otonom ini akan digunakan, dan akan membawa perubahan di Kalimantan Barat dan Indonesia. Sultan juga menyatakan bahwa generasi pemimpin gubernur selanjutnya di Kalimantan Barat tidak akan terlalu merubah perkembangan di KalBar sebelum hak otonomi ini digunakan sepenuhnya. Pak Simon juga menambahkan, selama menjabat sebagai Sultan di kerjaan Kadariah, Hamid II lebih dekat dengan rakyat dan banyak membantu rakyat, terutama mengenai Pendidikan

3. Sultan Hamid II menjadi Menteri Dalam Kabinet RIS

Dengan disetujuinya hasil-hasil dari Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 2 November 1949, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Diantara 16 negara bagian yang terpenting tersebut, selain RI (Republik Indonesia) yang mempunyai luas daerah dan penduduk terbanyak adalah negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan dan negara Indonesia Timur. Sedangkan yang memegang jabatan sebagai presiden atau kepala negara di RIS adalah Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Moh Hatta

diangkat sebagai perdana menteri yang pertama. Adapun tokoh-tokoh terkemuka yang ikut tergabung dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik sendiri seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Juanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, Dr Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Laoh. Sedangkan dari pihak BFO yaitu Sultan Hamid II dan Ide anak agung Gde Agung.

Meskipun ada perbedaan pandangan dari kedua pimpinan tersebut antara Anak Agung dan Sultan Hamid II. Dilain pihak pada saat berakhirnya Konfrensi Antar Indonesia, telah dicapai beberapa persetujuan mengenai bentuk dan Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat, antara lain yaitu:

1. Negara Indonesia serikat di setujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalism.
2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang akan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian (Senat). yang sebelumnya pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.

Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang ada, maka dapat diambil simpulan dari skripsi yang berjudul Eksistensi Tokoh Sultan Hamid II Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan di Indonesia (1943-1955) ini. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Kaderie atau yang lebih

dikenal dengan nama Sultan Hamid II, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913. Sultan Hamid II merupakan anak sulung dari Sultan Syarif Muhammad Al-Kaderie yang dilahirkan dari istri ketiganya yang bernama Syecha Jamilah Syarwani. Sultan Hamid II dalam eksistensinya memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia baik ditingkat nasional maupun lokal, memang memiliki karakteristik tersendiri. Sultan Hamid II lebih cenderung banyak menyumbangkan peran pemikirannya dari pada dengan kekuatan fisik. selain itu, Sultan Hamid II juga telah banyak ikut serta dalam beberapa acara penting kenegaraan, baik itu konfrensi dan lain sebagainya.

Peranan Sultan Hamid II di Indonesia terlihat pada masa Indonesia masih berstatus NIS (Negara Indonesia Serikat). saat itu diadakanlah suatu Konfrensi Antar Indonesia, yang membahas kelanjutan mengenai bagaimana nasib NIS selanjutnya. pada saat itu Sultan Hamid II menjabat sebagai Sultan di Kerajaan Keraton Kadariah Pontianak dan sebagai ketua DIKB, Pada akhir Konfrensi Antar Indonesia tersebut, didapatkanlah suatu keputusan yang dimana terjadi perubahan diri pada NIS beserta tata pemerintahannya yang baru menjadi RIS, Masalah status RIS selanjutnya dibicarakan lebih rinci dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) 23 Agustus 1949 di Den Haag.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kadrie, Syarif Abdurrahman. (2000). *Persepektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*. Pontianak: Romeo Grafika
- Anhar Gonggong. 22 November 2008. *Seminar Nasional Menggali Nilaian Kepahlawanan Bangsa*. dalam makalahnya: *Sosok Pahlawan Indonesia : Dalam Periode Kolonialistik dan Dalam*

- Era Kemerdekaan. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
- Dalam Peraturan Perundang-Undangan). Universitas Indonesia: Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan
- Syafaruddin usman. (2000). Sejarah Pemerintahan Kesultanan dan Pontianak. Pontianak: Romeo Grafika Pontianak
- Syafaruddin Usman. (2007). Denyut Nadi Revolusi Kemerdekaan Di Kalimantan Barat (1945-1950). Pontianak : Korem 121/Alambhana Wanawwai.
- Syafaruddin Usman. (2009). Peristiwa Mandor Berdarah : Eksekusi massal 28 Juni 1942 oleh Jepang. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI)
- Turiman Fachturahman Nur. Memaknai Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Simbolisasi Pancasila Dalam Lambang Negara Republik Indonesia: "Menelusuri "Jejak Tercecer" Semiotika Pancasila dan Kebhinekaan NKRI (Suatu Paparan Filosofis Pancasila dan Keutuhan NKRI), Makalah disampaikan dalam Rangka Memperingati hari Pahlawan 10 November 2009 di Pontianak
- Turiman Faturrahman Nur. Kilas Balik Sejarah Hukum DIKB. Borneo Tribune. tanggal 7 Agustus 2007
- Turiman Fachturahman Nur. (2000). Tesis: Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara
- Umar Affandi. (2010). Sejarah Kontemporer KalBar Sejak Tempoe Doeloe (Mozaik Sejarah Feodal Lokal: Peristiwa Sultan Hamid II Al-Kadrie, Sebuah Kecelakaan Sejarah (Berdasarkan Pleidoi Pembelaannya)). Pontianak : Romeo Grafika
- Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqadrie, M.Sc. karya tulis Kesadaran Sejarah, Konsep Putera Daerah dan Multikulturalisme. <http://Syarif-untan.tripod.com/budaya.htm>/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak/ Copyright 2006. diakses pada tanggal 26 Agustus 2010, pukul 09.00 AM.
- Sultan Hamid II Pencipta Lambang Negara. Tersedia pada <http://istanakadariah.blogspot.com/2007/07/sultan-hamid-ii-pencipta-lambangnegara.html>. Diakses pada tanggal 15 januari 2008, pukul 2:42 AM